

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses politik dalam formulasi kebijakan tentang program pembangunan Gedung perkantoran di Kabupaten Bone yang tertuang dalam RKPD tahun 2021, terjadi fenomena menarik selama proses perumusan kebijakan mengingat hal ini dipengaruhi karena kepentingan pimpinan kepala daerah dan beberapa anggota DPRD sehingga prosesnya di permudah meskipun menerima penolakan dari masyarakat, namun Program Gedung Tower tersebut ditunda karena adanya *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 tapi pada tahun selanjutnya ditetapkan kembali untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Landasan Teori yang digunakan adalah formulasi kebijakan yang meliputi (Tahap-tahap formulasi kebijakan, Model Formulasi Kebijakan, Identifikasi Aktor, Nilai aktor dan Interaksi Aktor) sebagai kerangka untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan bagaimana memperjuangkan kepentingannya melalui interaksi untuk menawarkan nilai dimilikinya, untuk mengungkap fenomena pada proses politik terhadap perumusan program pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Metode Penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus (*Case Study*) untuk menelusuri fenomena secara mendalam yang terjadi selama proses formulasi kebijakan pembangunan Gedung Tower sehingga memperoleh pengetahuan lebih lanjut secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara untuk menggali informan yang terlibat sedangkan teknik dokumentasi untuk melengkapi data melalui media cetak, media massa dan dokumen privat, Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keaslian data menggunakan Teknik Triangulasi sumber data dengan tujuan menghindari bias data yang diperoleh.

Hasil penelitian ditemukan selama proses politik dalam formulasi kebijakan pembangunan gedung perkantoran di Kabupaten Bone untuk RKPD tahun 2021, bahwa ide utama (aktor utama) program pembangunan Gedung Tower ialah Bupati Bone untuk kepentingan politiknya yaitu menginginkan persembahan berupa cendera mata di masa akhir jabatannya. Nilai politik dan nilai pribadi seorang Bupati mampu melakukan *bargaining* terhadap legislatif untuk memenuhi kepentingannya, sehingga beberapa anggota DPRD terkelabui atas kebijakan tersebut. Kemudian masyarakat menilai kehadiran Gedung Tower tersebut hanya representasi *icon* pengabaian kepentingan publik dikarenakan selama proses penetapan kebijakan, suara publik terus diabaikan meskipun kelompok-kelompok masyarakat terus melakukan aksi protes.

Kata Kunci : Program Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah, Proses Politik, Formulasi Kebijakan

ABSTRAC

This study aims to explore the political process in policy formulation regarding the program of Tower building construction in Bone Regency as stated in the 2021 Regional Government Work Plan (RKPD). An interesting phenomenon occurred during the policy formulation process considering that this was influenced by the interests of regional heads and several other actors. so that the process was simplified even though it received rejection from the public, but the Tower Building Program was postponed due to the refocusing of the Covid-19 handling budget.. However, in the following year it was redefined for the 2021 Regional Government Work Plan (RKPD).

The theoretical basis used as a framework of this study is policy formulation such as the stages of policy formulation, Policy Formulation Model, Actor Identification, Actor Value and Actor Interaction. The theories are to identify the actors involved and how to fight for their interests through interactions to offer their values, to uncover phenomena on the political process towards the formulation of the Regional Government Office Building program for Bone Regency.

Qualitative research approach with single case study design was used to explore in-depth phenomena that occurred during the policy formulation process for the Tower Building program as to gain further scientific knowledge. Interviews as research instrument was chosen to investigate the participants and documentation technique is used to complete data through printed media, mass media and private documents. Data reduction, data presentation and statement conclusions were used as data analysis. Data Triangulation technique was used to avoid bias and assess the authenticity of data.

The results of the study revealed that the first idea for Tower Building program construction came from Regent of Bone for his political interests, where the building will be his legacy as regent bone. Political values and personal values of a regent are able to bargain with the legislature to fulfill their interests, so that some DPRD members are deceived by this policy. In addition, public considered that the construction of the Tower Building will be an icon represents “ignorance” since during the policy-making process, public voices continued to be ignored even though community groups continued to protest.

Keywords: Regional Government Building Construction Program, Political Process, Policy Formulation